

**POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT KURAI PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

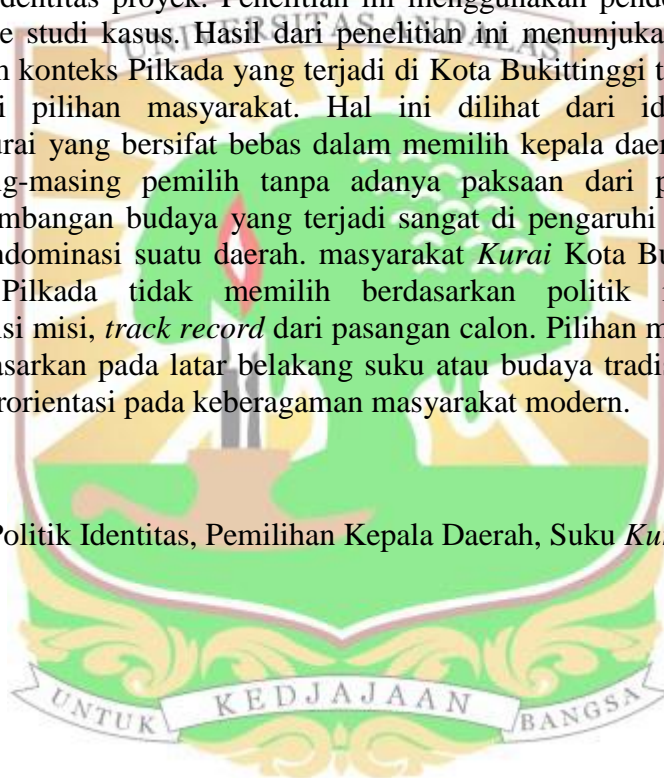


**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Politik identitas menjadi isu yang kerap muncul pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 isu politik identitas juga muncul di Kota Bukittinggi. Masyarakat Kurai sebagai masyarakat asli Bukittinggi menginginkan walikota berasal dari Kurai (putera daerah). Namun, pada pemilihan kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 walikota yang terpilih bukan berasal dari orang Kurai, sebagaimana periode-periode sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengorganisasian diri politik identitas masyarakat Kurai pada pemilihan kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2020. Landasan teori yang digunakan berasal dari Manuel Castells mengenai politik identitas yaitu identitas legitimasi, identitas resisten, dan identitas proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas dalam konteks Pilkada yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun 2020 tidak mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini dilihat dari identitas resisten masyarakat kurai yang bersifat bebas dalam memilih kepala daerah dan kembali kepada masing-masing pemilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adanya perkembangan budaya yang terjadi sangat di pengaruhi oleh faktor dari luar yang mendominasi suatu daerah. masyarakat *Kurai* Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan Pilkada tidak memilih berdasarkan politik identitas tetapi berdasarkan visi misi, *track record* dari pasangan calon. Pilihan masyarakat Kurai tidak lagi didasarkan pada latar belakang suku atau budaya tradisional setempat, tetapi lebih berorientasi pada keberagaman masyarakat modern.

Kata Kunci : Politik Identitas, Pemilihan Kepala Daerah, Suku *Kurai*



ABSTRACT

Identity politics is an issue that often arises in every regional head election. In the 2020 regional head election, the issue of identity politics also emerged in the City of Bukittinggi. The Kurai people as the original people of Bukittinggi want the mayor to come from Kurai (the son of the region). However, in the 2020 Bukittinggi City regional head election, the elected mayor did not come from Kurai people, as in previous periods. The purpose of this study is to describe and explain the self-organization of the Kurai community's identity politics in the 2020 local election of the City of Bukittinggi. The theoretical basis used comes from Manuel Castells regarding identity politics, namely legitimacy identity, resistant identity, and project identity. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that identity politics in the context of the Pilkada that took place in Bukittinggi City in 2020 did not affect people's choices. The choice of the Kurai people is no longer based on their ethnic background or local traditional culture, but is more oriented towards the diversity of modern society. This can be seen from the resistant identity of the kurai community who are free in choosing regional heads and returning to the hearts of each voter without any coercion from any party. The existence of cultural developments that occur is strongly influenced by external factors that dominate an area. Kurai people in Bukittinggi City did not vote based on identity politics but based on the vision and mission, track record of the candidate pairs.

Keywords: *Identity Politics, Regional Head Election, Kurai Ethnic*

